

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK PELAKU
PENGEROYOKAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

DHANY SETYOWATI

C100160049

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK PELAKU PELAKU
PENGEROYOKAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN**

PUBLIKASI ILMIAH

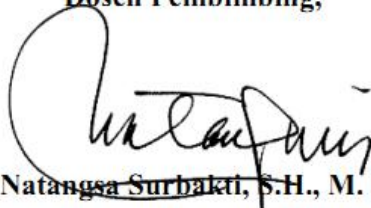
oleh:

DHANY SETYOWATI

C100160049

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', is written over a horizontal line.

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M. Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK PELAKU Pengeroyokan
YANG BERAKIBAT KEMATIAN**

OLEH
DHANY SETYOWATI
C100160049

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 11 Januari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M. Hum**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Sudaryono, SH., M.Hum**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Hartanto, SH., M.Hum**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

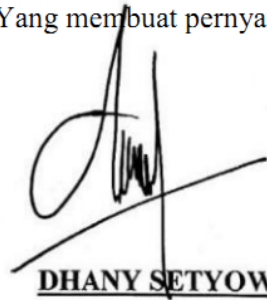
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 3 November 2020

Yang membuat pernyataan,



DHANY SETYOWATI

C100160049

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK PELAKU PENGEROYOKAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN

Abstrak

Kekerasan dewasa ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak. Anak di bawah umur yang melakukan perbuatan semacam ini dapat dikategorikan sebagai pelaku juvenile delinquency. Anak yang demikian ini didefinisikan sebagai seseorang yang sudah berusia 12 tahun tetapi masih belum berusia 18 tahun oleh Pasal 1 ayat (3) UU no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Juvenile delinquency sendiri berarti perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana yang dilakukan anak. Sanksi yang dijatuhkan pada orang dewasa tentunya tidak dapat diterapkan pada anak meskipun perbuatan yang dilakukan memiliki kualifikasi sama. Alasan terdapat perbedaan sanksi pada anak adalah tujuan dari SPPA yaitu keadilan dan perampasan kebebasan menjadi pilihan terakhir yang dapat dilakukan pada anak (*ultimum remedium*). Tujuan dari penelitian ini untuk menyelidiki alasan pidana berupa perampasan kebebasan dapat dijatuhkan pada anak.

kata kunci: kekerasan, juvenile delinquency, sanksi, sistem peradilan pidana anak (sppa).

Abstract

The violence these days is not only used by adult but also youngsters. A minor child as a youngster who committed this kind of action can be defined as committed juvenile delinquency. The definition of minor child as the writer refers in the beginning is the one who has been reached the age of 12 but has not reached yet, based on Article 1 verse (3) in Children's Criminal Justice System of Law No. 11 Year 2012. Juvenile delinquency itself is an act of a minor child which violating the law or committing a crime. The sentences of a crime that committed by an adult is certainly cannot be applied to a minor child even the action has the same kind of qualifications. The reason behind differentiated of the sentencing towards a minor child is the main purpose of Children's Criminal Justice System to bring the equality and deprivation of freedom as the last option can be done against them (*ultimum remedium*). The aim of this research is to exploring the reason behind deprivation of freedom sentence can be applied to the minor child.

Keywords: violence, juvenile delinquency, sentences, children's criminal justice system.

1. PENDAHULUAN

Belakangan ini di Indonesia telah terjadi pergeseran tata nilai dari tertib hukum yang berlaku menjadi hukum rimba yang mana di dalamnya sering terjadi praktek main hakim sendiri, baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum (Setiawan, 2015). Kondisi ini semakin memprihatkan, karena anak yang seharusnya menjadi cerminan sikap hidup suatu bangsa dan merupakan generasi

penerus nasib negara di masa yang akan datang, juga memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri ini (Teguh, 2018). Bentuk dari main hakim sendiri yang dilakukan oleh anak-anak ini dapat berupa perkelahian yang dipicu oleh adanya konflik antar kelompok, antar sekolah, antar geng, antar suku maupun konflik antara kelompok dengan individu (Soetodjo, 2006). Kesemuanya itu melibatkan kekerasan fisik dan sering kali menimbulkan kerusakan, rasa sakit, luka berat, cedera, bahkan berakibat kematian (Gultom, 2012). Kekerasan fisik yang mereka lakukan ini juga tidak hanya terjadi di tempat yang sepi saja, melainkan di tempat terbuka atau tempat umum yang padat penduduk.

Sejatinya KUHP telah mengatur mengenai kekerasan di muka umum ini di dalam Pasal 170 ayat (1), sebagai berikut:

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Tentunya Peradilan Anak mempunyai karakteristik dan perbedaan tersendiri dalam memperlakukan anak (baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi). Proses peradilan dan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak tentu berbeda dengan orang dewasa yang memiliki kesamaan kualifikasi rumusan tindak pidana pada ketentuan KUHP (Pradityo, 2016).

Pembedaan ancaman pidana ini, semata-mata ditujukan agar mental anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Pertimbangan yang lainnya adalah untuk mengayomi dan melindungi masa depan anak. Oleh karena itulah dalam penjatuhan pidana dan perberlakuannya terhadap anak perlu diperhatikan secara khusus, sebab keputusan Hakim dalam peradilan pidana anak harus mengutamakan pemberian bimbingan edukatif di samping tindakan yang bersifat menghukum.

Melihat latar belakang yang demikian, maka penulis tertarik menulis penelitian yang berisi: (1) Bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak yang melakukan pengeroyokan yang berakibat kematian? (2) Bagaimana penanggulangan agar anak tidak melakukan tindak pidana pengeroyokan? (3) Bagaimana Hukum Islam memandang tindak pidana kekerasan?

Penulis mengharapkan tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, yaitu: (1) untuk mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak yang melakukan pengeroyokan yang berakibat kematian; (2) Untuk dapat memahami penanggulangan agar anak tidak melakukan tindak pidana pengeroyokan; (3) Untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam atas tindak pidana kekerasan.

2. METODE

Metode pendekatan normatif-empiris yang merupakan penggabungan dari metode pendekatan normatif dan metode pendekatan empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap dari teori dalam perundang-undangan dengan pelaksanaannya yang dikaji dan dianalisis secara kualitatif menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari interpretasi ketentuan penerapan sanksi hukum pidana anak terhadap pengeroyokan berakibat kematian yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini menggunakan perundang-undangan dan penerapannya sebagai objek penelitian untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai tindak pidana pengeroyokan yang berakibat kematian yang dilakukan oleh anak.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 9/Pid.sus-Anak/2017/PN. Skt. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa hasil karya dan penelitian dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pengeroyokan dan tindak pidana anak.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang mengkaji dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang berakibat kematian yang dilakukan oleh anak, serta melalui wawancara kepada hakim PN Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa kualitatif yang menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari permasalahan umum ke khusus, dalam hal ini perundang-undangan yang berkaitan dengan

tindak pidana pengeroyokan yang berakibat kematian yang dilakukan oleh anak akan dianalisis pada penerapannya melalui data yang telah diperoleh penulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sanksi Pidana yang Dijatuhkan pada Anak yang Melakukan Pengeroyokan yang Berakibat Kematian

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Skt menyatakan bahwa Anak Aditya Eka Prasetya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan kematian salah satunya dapat dilihat dari unsur-unsur pada Pasal 170 ayat (2) butir ke-3 KUHP. Penulis melihat adanya kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan pendapat R. Soesilo mengenai unsur-unsur dalam Pasal 170 KUHP, seperti berikut ini: (1) Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan, bisa terdiri dari merusak barang atau penganiayaan. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, terdakwa memukul korban di bagian kepala dan bahu berkali-kali dengan bambu, hingga bambu tersebut pecah menjadi lima bagian; (2) Kekerasan tersebut harus dilakukan bersama-sama sedikitnya dua orang atau lebih, serta ditujukan pada orang atau barang. Hal ini ditunjukkan dengan perbuatan terdakwa memukuli korban bersama dengan keempat rekannya; (3) Terdakwa bersama rekannya memukuli korban di Kantor Kelurahan Joyontakan, maka sesuai dengan penafiran unsur oleh R. Soesilo bahwa kekerasan itu juga harus dilakukan di tempat publik dapat melihatnya (Soesilo, 1985). Ditinjau dari adanya kesesuaian antara doktrin dan penafsiran hakim atas unsur Pasal 170 ayat 2 butir-3 KUHP, serta perbuatan terdakwa seperti di atas, penulis beranggapan bahwa terdakwa memang telah melakukan tindak pidana.

Tentunya penjatuhan pidana atas terdakwa yang masih dalam kategori anak tidak bisa disamakan dengan terdakwa orang dewasa. Ibu Juli Handayani, SH., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara anak dan orang dewasa dalam kematangan psikis, cara berpikir dan pertanggungjawabannya, meskipun tidak

jarang modus yang dilakukan oleh anak sudah bisa menyamai modus yang dilakukan oleh orang dewasa (Handayani, 2020).

Berdasarkan pandangan dualistis yang memisahkan antara tindak pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), Roeslan Saleh menjelaskan bahwa perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Dipidana atau tidaknya pelaku yang telah melakukan perbuatan tergantung pada ada atau tidak kesalahan dalam perbuatan yang ia lakukan. Perbuatan tersebut apabila di dalamnya terdapat kesalahan, maka patutlah ia dipidana (Saleh, 1983).

Pertanggungjawaban pada dasarnya tidak dirumuskan KUHP secara gamblang, tetapi di dalamnya dijelaskan mengenai ketidak mampuan dalam bertanggungjawab yang dituangkan pada Pasal 44 KUHP. Mereka yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya disebabkan karena jiwanya yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit.

Kemampuan bertanggungjawab juga berkaitan dengan usia si pembuat, artinya pembuat harus mencapai batas usia tertentu untuk dapat dikatakan mampu bertanggungjawab secara pidana. KUHP menyebutkan bahwa anak yang berusia kurang dari 16 tahun termasuk orang yang belum cukup umur. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menerangkan bahwa anak yang berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun sudah dapat disangkakan melakukan tindak pidana yang disebut sebagai anak yang berkonflik hukum (Pasal 1 angka 3). Hanya saja untuk pertanggungjawabannya dalam hal dapat dipidana, anak yang usianya di atas 14 tahunlah yang dapat dijatuhi pidana berdasar penafsiran Pasal 69 (Sudaryono & Surbakti, 2005).

Penulis sependapat dengan majelis hakim bahwa terdakwa telah mampu bertanggungjawab, sebab terdakwa lahir pada 26 September 2002 dan ketika perbuatannya dilakukan (2017), terdakwa masih berusia 15 tahun. Usia tersebut memang jika dilihat dalam Pasal 45 KUHP masih dianggap belum cukup umur, akan tetapi mengingat adanya asas *lex specialis* di mana ketentuan dalam Undang-undang SPPA yang bersifat lebih khusus mengesampingkan ketentuan dalam KUHP yang bersifat lebih umum. Artinya terdakwa sebagai anak yang berkonflik

hukum sudah dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 Undang-undang SPPA.

Penulis beranggapan bahwa terdakwa melakukan perbuatan ini dengan sengaja. Sengaja yang dimaksudkan berkaitan dengan sikap batin terdakwa yang mengetahui atau menghendaki perbuatan tersebut terjadi. Kesengajaan terdapat dua teori, yakni: teori kehendak yang menyebutkan bahwa harus ada kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana, serta teori membayangkan yang mana pelaku dapat membayangkan dampak yang mungkin timbul dari perbuatannya (Kalia, 2013). Kesengajaan yang dilakukan terdakwa ini sesuai dengan teori kehendak yang diwujudkan dengan perbuatan terdakwa ketika mengikuti ayahnya (saksi Riswanto) dengan membawa sepotong bambu bersama rekannya mengejar korban dan memukulinya di lantai dua kantor kelurahan Joyantakan.

Melihat alasan pembenar dan pemaaf pada KUHP adalah sebagai berikut: Tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44); Daya paksa / *overmacht* (Pasal 48); Keadaan darurat / *noodtoesteand* (Pasal 48); Pembelaan darurat / *noodweer* (Pasal 49 ayat (1)); Pembelaan darurat yang melampaui batas/*noodweer-exess* (Pasal 49 ayat (2)); Melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50); Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51). Penulis menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan oleh KUHP seperti di atas, kemudian mengingat terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur delik pada Pasal 170 ayat 2 butir-3 KUHP, dan mampu bertanggungjawab secara pidana, serta tidak ditemukannya alasan pembenar atau pemaaf dalam perbuatannya, maka oleh karenanya atas perbuatan terdakwa patut untuk dijatuhi pidana.

Menurut Ibu Juli Handayani, pada prakteknya acuan dalam menyidangkan perkara anak adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai pertimbangan yuridis dan hasil Litmas (penelitian kemasyarakatan) BAPAS sebagai pertimbangan non-yuridis. Pada dasarnya dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, Undang-undang SPPA mengatur untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang oleh karenanya pidana merupakan langkah terakhir yang dapat diupayakan (*ultimum remidium*).

Pendekatan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara di mana pelaku dan korban duduk bersama untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak (Sukoco, 2016). Hal ini diwujudkan dengan adanya diversi, namun tentunya Undang-undang SPPA telah memberikan beberapa syarat, yaitu: perbuatan diancam pidana kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan (*recidive*). 7 tahun yang dimaksudkan dalam syarat diversi ini dijelaskan oleh Ibu Juli Handayani bahwa ini dihitung dari ancaman yang tertera dalam pasal yang dilanggar anak dan bukan merupakan ancaman pidana yang sudah dikurangi $\frac{1}{2}$ seperti halnya diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang SPPA, yaitu anak hanya bisa dijatuhi pidana paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana bagi orang dewasa. Artinya terdakwa tidak dapat melakukan diversi atas perkaranya, karena tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Pasal 7 Undang-undang SPPA, mengingat pasal yang dilanggar terdakwa adalah Pasal 170 ayat (2) butir 3 KUHP yang mengancam pidana selama paling lama 12 tahun.

Di dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Skt, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 tahun 8 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kutoarjo (Jawa Tengah). Majelis hakim juga memutuskan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Data yang penulis peroleh berupa putusan hakim ini, di dalamnya nampak adanya pengurangan terhadap masa pidana sebagaimana pernyataan di atas. Penulis beranggapan bahwa pengurangan masa pidana tentunya menjadi pembeda porsi pidana yang dijatuhkan pada orang dewasa dan anak, serta dengan adanya perbedaan porsi tersebut dapat menguntungkan bagi kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Kesejahteraan anak sejatinya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 2 dan 3 Undang-undang SPPA.

Penulis melihat bahwa keputusan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana selama 1 tahun 8 bulan ini dapat menjadi ganjaran setimpal atas perbuatan terdakwa sebagai perwujudan dari teori tujuan absolut (pembalasan) yang mana

menyebutkan bahwa pidana merupakan pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Pemidanaan ini juga membuat terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan berdasarkan pernyataannya dalam persidangan sehingga diharapkan kedepannya tidak mengulang perbuatan tersebut sebagaimana tujuan yang ingin dicapai dalam teori relatif (tujuan) yang menitik beratkan pada penjeraan dan pencegahan *recidive*.

3.2 Penanggulangan Agar Anak Tidak Melakukan Pengeroyokan

Ibu Juli Handayani berpendapat sering kali anak ketika melakukan *juvenile delinquency* dilatarbelakangi dari lemahnya atau lepasnya kontrol dari orangtua terhadap anak maupun dari pengaruh pergaulannya yang salah. Mengingat latar belakang anak melakukan hal yang demikian, maka dapat dilakukan penanggulangan melalui (Soedarto, 1986):

3.2.1 Upaya Non-Penal

Penanggulangan melalui upaya non-penal berupa penanganan terhadap faktor yang melatarbelakangi perbuatan itu, upaya ini bersifat preventif atau dikenal sebagai upaya pencegahan sebelum perbuatan dilakukan. Dalam mencegah agar anak tidak melakukan atau terlibat dalam pengeroyokan, maka keluarga dapat berupaya untuk menciptakan lingkungan harmonis dan tidak mengedepankan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan masalah; memberikan pendidikan agama dan budi pekerti; mengajarkan pengendalian emosi agar anak tidak mudah tersulut; menanamkan disiplin pada anak; memberikan kebebasan sewajarnya dan tidak mengekang; serta tidak memanjakan anak sehingga anak tidak menjadi egois dan dapat menghargai orang lain. Lingkungan sekolah dapat memberikan pendidikan budi pekerti, memberikan kegiatan yang dapat mengalihkan anak dari pikiran untuk melakukan perbuatan kekerasan, juga melakukan koordinasi kepada orangtua bagaimana sikap anak atau adakah indikasi melakukan kekerasan atau tindak pidana lain. Upaya dari lingkungan sosial masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya siskamling oleh masyarakat sekitar, kemudian untuk kepolisian dapat dilakukan patroli atau razia pada daerah-daerah yang rawan melakukan kekerasan baik tawuran maupun pengroyokan, serta penyuluhan mengenai tindak pidana dan pasal-pasal yang dapat menjeratnya (Florentina & Umi Rozah & A.M, 2019).

3.2.2 Upaya Penal

Penanggulangan melalui upaya penal (hukum pidana) bersifat represif atau dikenal sebagai upaya pemberantasan setelah perbuatan dilakukan ini, dapat diwujudkan dalam bentuk perumusan norma hukum pidana mengenai pengeroyokan oleh anak, penegakan hukum, penjatuhan sanksi baik pidana maupun tindakan. Upaya ini juga bersifat preventif, karena dengan adanya kebijakan ini diharapkan mampu mencegah suatu perbuatan seperti pengeroyokan untuk dilakukan melalui ancaman dan penjatuhan pidana atas perbuatan yang demikian (Arief, 2007).

Perumusan norma berkaitan erat dengan mengkriminalisasikan perbuatan berupa ke pengeroyokan kekerasan bersama oleh anak. Kriminalisasi merupakan kebijakan menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang dapat dipidana yang mana perbuatan tersebut sebelumnya bukan merupakan tindak pidana. Penetapan pengeroyokan oleh anak ini sebagai tindak pidana tentunya dapat dilihat dengan adanya kebijakan pada KUHP Pasal 170 dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena pelaku masih di bawah umur khususnya Pasal 81 ayat (2) sebagai acuan dalam menjatuhkan pidana.

Penegakan hukum terhadap pengeroyokan tentunya didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja lembaga penegakan hukum; kesejahteraan aparatnya agar motivasi dan etos kerja mereka menjadi lebih tinggi; serta seperangkat aturan yang dapat mengatur agar standar kerja aparat menjadi lebih baik baik materiil maupun formil. Penjatuhan sanksi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diharapkan dapat membuat anak jera dan tidak mengulangi lagi pengeroyokan. Anak-anak yang berniat melakukan kekerasan yang bersama-sama juga diharapkan untuk berpikir kembali agar tidak melakukan perbuatan yang demikian ini dengan adanya konsekuensi yang akan mereka hadapi ke depannya.

3.3 Pendangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan

Al-Syatibi (w. 790 H) secara tegas menyatakan bahwa tujuan utama penerapan hukum Allah (*syara'*) adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, karenanya kewajiban (*taklif*) dalam bidang hukum harus

mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut (Musolli, 2018). Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum *syara'* yang apabila dilanggar berakibat membahayakan agama, jiwa, kehormatan dan harta benda disebut sebagai *jarimah* (Ichwanto, 2017). Kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan kerusakan atau perlukaan terhadap makhluk Allah (orang) terutama pada tubuhnya, sehingga dapat dikategorikan sebagai *jarimah* perlukaan yang mengancam kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam *maqashid al-syariah*.

Sanksi terhadap kekerasan pada umumnya ditentukan oleh bentuk perlukaan yang dilakukan pembuatnya berupa: (1) *Qhisash* atau *diyat* dan *ta'zir*, apabila yang dilakukan merupakan perlukaan dengan cara memotong anggota tubuh hingga terputus (*Ibanat Al-Atraf*); (2) *Diyat*, apabila yang dilakukan merupakan perlukaan dengan cara menghilangkan fungsi atau manfaat dari anggota tubuh (*Izhab Ma'a Al-Atraf*); (3) *Qhisash* atau *diyat* atau hukum keadilan, apabila yang dilakukan merupakan perlukaan pada kepala dan wajah (*Asy-Syaj*) serta perlukaan pada selain pada kepala dan wajah (*Al-Jarh*) (Burlian, 2015).

Ketentuan banyak sedikitnya *diyat* yang harus dibayar oleh pelaku tentunya bergantung pada pertimbangan hakim sesuai dengan kepantasan atas luka-luka anggota tubuh yang timbul akibat kekerasan ini, apabila menimbulkan kerusakan pada anggota badan tunggal (misalnya hidung) atau kedua anggota tubuh yang berpasangan (seperti mata, kaki, dan tangan) dapat dikenai *diyat* penuh, sedangkan apabila hanya salah satunya saja dikenai setengah *diyat*. Kemudian, jika dampak dari kekerasan itu menimbulkan kerusakan fungsi atau manfaat dari anggota tubuh itu akan ditimpakan *diyat* penuh (Basyir, 2014). Kekerasan yang menimbulkan kematian pada korbannya dianggap sebagai pembunuhan semi sengaja karenanya kekerasan semacam ini dapat dijatuhi *diyat* berat (*mughallazhah*). *Diyat* penuh setara dengan 100 ekor unta sehingga setengah *diyat* berarti sekitar 50 ekor unta, sedangkan untuk *diyat mughallazhah* setara dengan 100 ekor unta yang termasuk di dalamnya 40 ekor unta hamil. Pembunuhan semi sengaja di sini didefinisikan menurut Ulama *Syafi'iyah* sebagai pembunuhan yang terjadi apabila pelaku sengaja atas perbuatannya (menggunakan kekerasan) tetapi tidak bermaksud akan terjadi matinya korban (Muslich, 2004).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adanya pidana dengan pengurangan masa pidana pada anak dalam **Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Skt** sesuai dengan tujuan Pasal 23 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam menjamin kesejahteraan anak. Serta Pasal 2 dan 3 Undang-undang SPPA terutama Pasal 2 huruf d yang mana menegaskan dalam penjelasannya pengambilan keputusan harus didasari oleh kepentingan terbaik anak berupa kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan Pasal 2 huruf i yang menyatakan meskipun pidana atau perampasan kemerdekaan atas anak merupakan upaya terakhir, namun tetap dapat dilakukan apabila terpaksa demi kepentingan penyelesaian perkara, maka pemidanaan terhadap terdakwa merupakan langkah terbaik dalam penyelesaian perkara ini serta Pasal 3 huruf g yang menyebutkan bahwa terdakwa ditangkap, ditahan, atau dipenjara sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin. Penulis juga melihat bahwa majelis hakim telah bijak dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan sebagai sarana mewujudkan teori tujuan pidana gabungan atau perpaduan antara teori absolut dan relatif.

Pencegahan terhadap pengeroyokan oleh anak dapat ditempuh melalui upaya penal dan non-penal. Bentuk upaya penal dapat dilihat dengan adanya kriminalisasi atas perbuatan ini pada Pasal 170 ayat 2 butir-3 KUHP serta Pasal 81 ayat (2) Undang-undang SPPA sebagai acuan pidananya. Bentuk upaya non-penal dapat diwujudkan dengan mengatasi latar belakang yang menjadi alasan anak dalam melakukan perbuatan ini, tentunya dengan bantuan yang berasal dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Kekerasan yang dilakukan anak menurut pandangan Islam termasuk dalam pembunuhan semi sengaja yang dapat dilihat niat anak sebenarnya hanya memukuli saja dan tidak bertujuan untuk membunuh korban dari kesengajaannya dalam memukuli korban di bagian kepala dan bahu berkali-kali, yang kemudian korban meninggal ketika dalam perjalanan ke rumah sakit, sehingga apabila keluarga korban mengutamakan *diyat*, maka anak harus membayar *diyat mughallazhah*.

4.2 Saran

Melihat hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, agar hakim Pengadilan Negeri Surakarta tetap menjatuhkan putusan seadil-adilnya terutama yang berkaitan dengan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Kedua, Penanggulangan berupa pencegahan terhadap pengeroyokan oleh anak ini terutama yang melibatkan penyuluhan kepada anak mengenai tindak pidana dan ancamannya secara keseluruhan dapat diterapkan di seluruh Indonesia tidak hanya penyuluhan yang berkaitan dengan narkoba saja yang digalakkan.

PERSANTUNAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah S.W.T., penulis berterimakasih atas bantuan dan dukungan baik secara moral maupun material sehingga penelitian ini dapat terwujud kepada: Kedua orang tua dan adik penulis; Bapak Natangsa Surbakti selaku dosen pembimbing; Ibu Juli Handayani, Hakim PN Surakarta selaku narasumber; serta teman-temanku sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum". http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. (diakses pada 15 Oktober 2020, pukul 15.21).
- Azhim, Syaikh Abdul bin Badawi al-Khalafi. "Diyat (Denda)". <https://almanhaj.or.id/945-diyat-denda.html>. (diakses pada 02 November 2020, pukul 18.17).
- Azizurrahman, Sy. Hasyim. "Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana di Era Cyber". <https://media.neliti.com/media/publications/155070-ID-pembaharuan-kebijakan-penegakan-hukum-pi.pdf>. (diakses pada 9 Oktober 2020, pukul 15.55).
- Basyir, Ahmad Azhar. 2014. *Ikhtisar Fikih Jinayah: Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Burlian, Paisol. 2015. *Implementasi Hukuman Qhishas di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Florentin, Brigita Feby & Umi Rozah & A.M. Endah Sri Astuti. "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengroyokan oleh Anak yang Menyebabkan Kematian di Kabupaten Wonosobo". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 8 No. 3. (____, 2019).
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Handayani, Juli. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 3 September 2020, pukul 08.30 WIB.
- Ichwanto, Alfian Maulidin. "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam". *Al-Qanun*. Vol. 20 No. 1. (Juni, 2017).
- Kalia, Hariati. "Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-luka". *Jurnal Hukum Legal Opinion*. Edisi 4 Vol 1. (____, 2013).
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-isu Kontemporer". *At-Turas*, Vol. V No. 1. (Januari-Juni, 2018).
- Pradityo, Randy. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Restorative Justice in Juvenile Justice System)". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 5 No. 3. (November, 2016).
- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Skt.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Setiawan, Marwan. 2015. *Karakteristik Kriminalistik Anak & Remaja dalam Perspektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, dan Moral*. Bogor: Galia Indonesia.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.
- Soesilo, R.. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: PT Karya Nusantara.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: FH UMS.
- Sukoco, Bambang. "Pendekatan Restoratif Justice sebagai Upaya Penyelesaian Cybercrime dengan Pelaku Anak: Studi Kasus Penyelesaian Tindak

Pidana Anak Usia Sekolah”. Jurnal Law and Justice. Vol. 1 No. 1. (Oktober, 2016).

Teguh, Harrys Pratama. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana – Dilengkapi dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Yuridis.id, Tim. “Mengenal Alasan Pembena dan Alasan pemaaf dalam Hukum Pidana”. <https://yuridis.id/mengenal-alasan-pembenar-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/>. (diakses pada 26 September 2020, pukul 09.33).